

Matriks Penyusunan Rencana Kerja ASDEP Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Tahun 2023

No	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	RAK	Rancangan RKP 2023				Janji Presiden	MAJOR PROJECT	ISU STRATEGIS BIDANG PMK	USULAN ALOKASI ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
					PN	PP	KP	PrP					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	2 RAK	Rumusan Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Desa dan Kawasan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2)	<p>PP-1 Pembangunan Wilayah Sumatera</p> <p>PP-4 Pembangunan Wilayah Kalimantan</p> <p>PP-6 Pembangunan Wilayah Maluku</p>	<p>KP4 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi</p>	<p>1. Pembangunan Desa Terpadu</p> <p>2. Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokpri</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Ketimpangan Antar Wilayah Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah Pemanfaatan ruang 	Rp. 515.000.000	Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial
2				Rumusan Alternatif Kebijakan Penguatan Konektifitas dan Mobilitas Spasial Guna Mendukung Kawasan Pusat Pertumbuhan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2)	<p>PP-3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara</p> <p>PP-5 Pembangunan Wilayah Sulawesi</p> <p>PP-7 Pembangunan Wilayah Papua</p>	<p>KP4 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi</p>	<p>1. Revitalisasi Kawasan Transmigrasi</p> <p>2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Ketimpangan Antar Wilayah Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah 	Rp. 515.000.000	Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial

3				Rumusan Alternatif Kebijakan Inisiatif Baru Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam mengelola Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan	PN2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara PP4 Pembangunan Wilayah Kalimantan PP7 Pembangunan Wilayah Papua	KP2 Pengembangan Komoditas Unggulan KP4 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	1. Pengembangan Komoditas Unggulan 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokpri 3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional			<ul style="list-style-type: none"> Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak huni 38,3%, air minum layak 61,3%, sanitasi layak 74,6%, dsb) (BPS, 2018) 	Rp. 500.000.000	Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial
4				Rumusan Alternatif Kebijakan Baru, Koordinasi Pemanfaatan Modal Sosial Budaya dalam mendukung Pengembangan Kawasan Geopark	PN2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP1: Pembangunan Wilayah Sumatera PP2: Pengembangan Wilayah Jawa-Bali PP3: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara PP4: Pembangunan Wilayah Kalimantan PP5 Pembangunan Wilayah Sulawesi	KP4 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	1. Pengembangan Desa Terpadu			Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 KEK, 3 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata)	Rp. 500.000.000	Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial

						PP7 Pembangunan Wilayah Papua							
TOTAL												Rp. 2.030.000.000	

Jakarta, 24 Maret 2022

Asisten Deputi Pemberdayaan
Kawasan dan Mobilitas Spasial



(Handwritten signature)

Mustikorni Indrijatiningrum